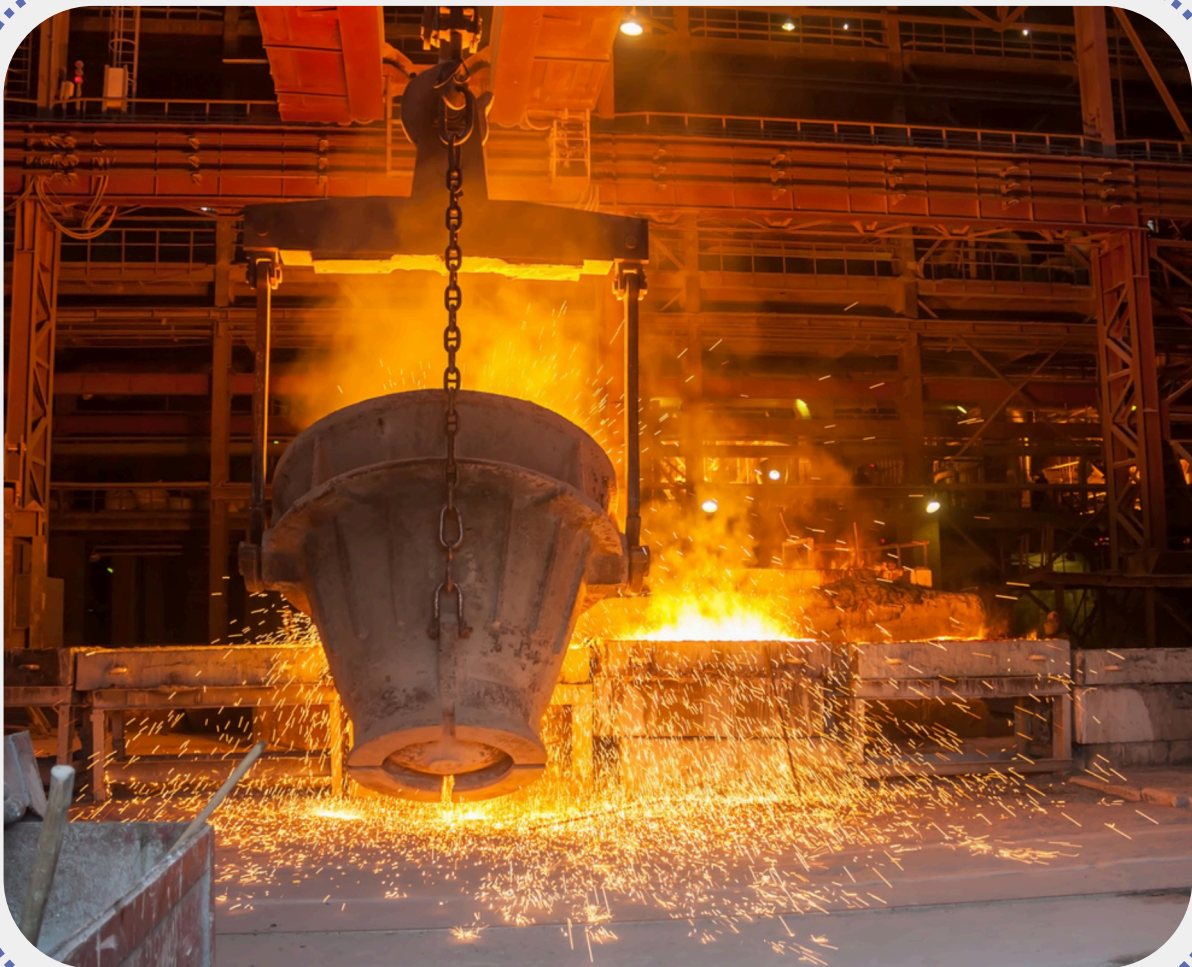


ISU-ISU ESG DI INDUSTRI TAMBANG DAN SMELTER INDONESIA



GAMBARAN BESAR

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Pemerintah melarang ekspor nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter di dalam negeri. Hasilnya: masuknya investasi besar-besaran, tetapi juga konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis tata kelola.

Bagi jurnalis, memahami isu ESG, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, adalah langkah awal untuk mengungkap siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana kekuasaan bekerja dalam industri ekstraktif.

TIGA PILAR PENTING: ENVIRONMENT (LINGKUNGAN), SOCIAL (SOSIAL), AND GOVERNANCE (TATA KELOLA)

Di industri pertambangan, menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola menjadi sangat penting agar kegiatan pertambangan bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Tiga pilar utama ini, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, menjadi pedoman

lagar perusahaan tambang bisa menjalankan operasinya dengan bertanggung jawab.

Lingkungan: Menjaga Sumber Daya Alam

Aspek lingkungan berfokus pada bagaimana mengurangi dampak negatif dari kegiatan tambang terhadap lingkungan sekitar. Beberapa poin pentingnya antara lain:

- **Pengelolaan Sumber Daya:** Menggunakan air dan energi secara efisien, serta memastikan bahan baku berasal dari sumber yang bertanggung jawab.
- **Pengendalian Polusi:** Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi, mengelola limbah dengan baik, dan mencegah pencemaran udara, air, maupun tanah.
- **Perlindungan Keanekaragaman Hayati:** Menjaga ekosistem dan habitat satwa liar yang terdampak kegiatan tambang.
- **Mitigasi Perubahan Iklim:** Mengadopsi praktik-praktik yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan keta-

hanan terhadap perubahan iklim.

- Melakukan langkah-langkah tersebut bukan hanya penting untuk memenuhi aturan lingkungan, tapi juga membantu menjaga keseimbangan ekologi dalam jangka panjang.

Sosial: Peduli pada Manusia dan Masyarakat

Aspek sosial menekankan pentingnya hubungan baik perusahaan dengan seluruh pihak terkait, seperti pekerja, masyarakat lokal, dan kelompok adat. Beberapa hal pentingnya mencakup:

- Kesehatan dan Keselamatan: Memastikan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan karyawan.
- Keterlibatan Komunitas: Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan dan menghormati hak-hak mereka.
- Praktik Ketenagakerjaan: Menjamin standar kerja yang adil, mencegah pekerja anak, serta mendukung keberagaman dan inklusi.
- Hak Asasi Manusia: Melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak dan secara aktif menangani keluhan yang muncul.

Dengan memperkuat hubungan sosial ini, perusahaan tambang bisa meningkatkan reputasi sekaligus mendapat kepercayaan dari berbagai pihak.

Tata Kelola: Manajemen yang Etis dan Transparan

Aspek tata kelola berkaitan dengan sistem dan proses yang memastikan perusahaan tambang dikelola secara efektif dan etis. Poin pentingnya meliputi:

- Tata Kelola Perusahaan: Menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di dalam organisasi.
- Kepatuhan dan Etika: Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum, regulasi, dan standar etika.
- Transparansi: Memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
- Akuntabilitas: Menyediakan mekanisme pengawasan yang jelas dan menangani secara tegas bila terjadi pelanggaran.

Praktik tata kelola yang kuat ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan integritas kegiatan perusahaan tambang.

Dengan menerapkan tiga pilar ESG ini dalam operasinya, perusahaan tambang tidak hanya bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, serta mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Saat ini, makin banyak perusahaan tambang yang menerapkan kerangka kerja ESG agar sejalan dengan tujuan keberlanjutan global serta memenuhi ekspektasi investor, regulator, dan masyarakat luas.

LINGKUNGAN: KERUSAKAN YANG TERUS MELUAS

Kasus	Investigasi
Deforestasi dan Hilangnya Habitat • Antara 2000–2019, 58% deforestasi tambang tropis global terjadi di Indonesia. • Halmahera: 5.300 ha hutan hilang akibat tambang nikel. • Kalimantan: tambang batu bara menjangkau kawasan hutan primer.	• Bandingkan data citra satelit (Global Forest Watch) dengan peta izin tambang. • Verifikasi apakah pembukaan hutan legal dan berizin.
Pencemaran Air dan Tanah • Limbah tambang mencemari sungai dan perairan di Sulawesi dan Halmahera. • Nelayan melaporkan air keruh dan kematian ikan.	• Ambil sampel air dan sedimen di sungai, sumber air tawar, dan air asin di perairan, lalu uji laboratorium. • Cek apakah perusahaan punya IPAL dan Amdal aktif. • Wawancara masyarakat di pesisir.
Emisi Udara dan Dampak Iklim • Smelter memakai PLTU batu bara; tambang tua lepas metana. Target karbon Indonesia terancam.	• Cek lokasi PLTU dan kualitas udara (IQAir, BMKG). • Bandingkan target RAN-GRK dengan emisi aktual proyek.
Kehilangan Keanekaragaman Hayati • Wallacea (Sulawesi–Maluku) adalah hotspot biodiversitas. • Jalan tambang memotong koridor satwa dan mangrove.	• Overlay peta IUP dengan peta kawasan konservasi. • Wawancara pakar ekologi, identifikasi spesies kunci yang terdampak.

SOSIAL: HAK, KESEHATAN, DAN IDENTITAS YANG TERANCAM

Kasus	Investigasi
Hak Tanah dan Konsultasi Adat (FPIC) - Banyak komunitas adat mengaku dipaksa melepaskan tanah. - Konsultasi sering tidak dilakukan atau hanya formalitas.	- Tanyakan: Apakah ada berita acara FPIC? Apakah tanah bersertifikat? - Pantau gugatan atau aksi protes.
Mata Pencarian dan Kesehatan - Air tercemar, hasil panen dan ikan menurun. - Nikel dalam udara bisa sebabkan kanker ($<0,05 \text{ mg Ni/m}^3$).	- Wawancara petani dan nelayan. - Minta data klinik lokal: ISPA, keracunan logam.
Keselamatan dan Kondisi Kerja Puluhan buruh tewas di pabrik nikel dalam 5 tahun terakhir.	- Telusuri laporan kecelakaan (Disnaker, Serikat Buruh). - Apakah SOP keselamatan dijalankan? Apakah ada audit K3?
Dampak Budaya - Hutan adat berkaitan dengan upacara dan identitas. - Komunitas yang direlokasi sering kehilangan fungsi sosial.	- Wawancara tetua adat, telusuri perubahan pola hidup. - Cek janji perusahaan: rumah, listrik, pekerjaan.

TATA KELOLA: DI MANA HUKUM DITEGAKKAN, DAN DI MANA TIDAK

Kasus	Investigasi
Korupsi dan Pengaruh Elit Izin tambang dikaitkan dengan tokoh politik dan yayasan keagamaan.	- Cek pemilik tambang (AHU, OpenCorporates). - Identifikasi relasi politik atau militer.
Transparansi Perizinan - Banyak izin tidak diumumkan publik. - Yayasan sering jadi pemegang izin, tapi bukan operator.	- Tanyakan: apakah lelang dilakukan? Apakah IUP aktif? - Cek keterlambatan bagi hasil ke daerah.
Penegakan Hukum Lemah Perusahaan besar jarang dijatuhi sanksi. Tambang ilegal masif.	- Telusuri laporan LSM, gugatan warga, dan pembatalan izin. - Amnesti tambang ilegal jadi sinyal rawan.
Perubahan Regulasi - UU Minerba mengharuskan divestasi ke perusahaan lokal. - Banyak “pemilik lokal” diduga proksi elit.	- Bandingkan struktur saham sebelum dan sesudah divestasi. - Apakah kepemilikan berubah, atau hanya nama di atas kertas?

STUDI KASUS RINGKAS

Lokasi	Masalah Utama	Apa yang Perlu Dilacak
Halmahera	5.300 ha hutan hilang, FPIC lemah	Gugatan adat, konflik lahan
Morowali	Kematian buruh, limbah PLTU	SOP keselamatan, audit K3
Kalimantan	Sungai tercemar, tambang luas	Kesehatan warga, tumpang tindih IUP



Pertanyaan Kunci untuk Liputan ESG:

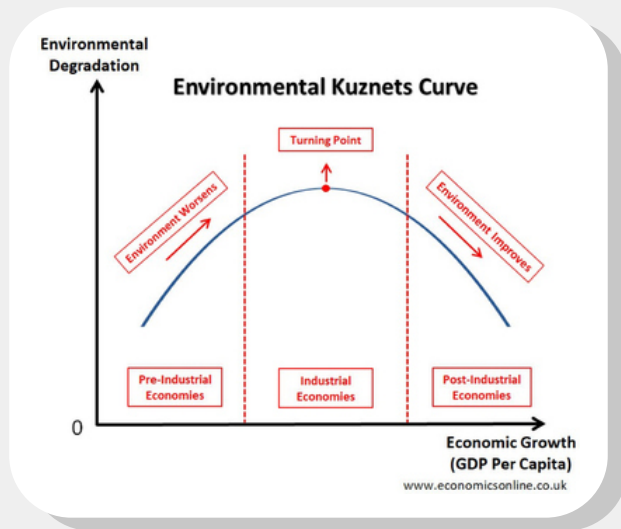
1. Siapa pemilik konsesi? Apakah ada hubungan politik?
2. Apakah izin dikeluarkan secara sah dan transparan?
3. Apa dampak lingkungan dan sosial proyek ini?
4. Siapa yang menanggung biaya tersembunyi?



Arah Liputan:

Kuatkan riset data. Wawancarai warga. Gunakan dokumen resmi. Bandingkan klaim perusahaan dengan kondisi lapangan. Bongkar struktur kuasa di balik tambang. Dokumen ini bukan opini. Ini kerangka kerja investigasi.

DAMPAK EKONOMI JANGKA PANJANG



Ketergantungan pada Sumber Daya yang Tidak Terbarukan

Industri yang terlalu bergantung pada nikel dapat mengalami krisis ekonomi jika harga nikel anjlok atau cadangan nikel habis.

Biaya Pemulihan Lingkungan yang Tinggi

Reklamasi lahan pascatambang membutuhkan dana besar, yang sering kali hal ini tidak dihitung sebagai tanggungan yang mesti dibayar perusahaan tambang.

Kelompok Miskin Bakal Tambah Sengsara

Pascatambang, beban lingkungan dan ekonomi yang harus

ditanggung kelompok miskin bakal lebih tinggi lagi.

Pertanyaan Utama: Siapa menikmati pertumbuhan ekonomi dari Nikel dan siapa yang menanggung dampak buruknya?

MENGHITUNG BIAYA TERSEMBUYI DARI TAMBANG DAN HILIRISASI

Biaya Lingkungan

- Deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati: Hitung luas hutan yang ditebang (hektar) dan biaya restorasi per hektar.
- Pencemaran air dan tanah: Biaya pembersihan air limbah dan rehabilitasi tanah akibat pencemaran logam berat.
- Emisi karbon dan polusi udara: Hitung emisi CO₂ dan polutan lainnya dalam ton, lalu konversi ke biaya sosial karbon (Social Cost of Carbon - SCC).
- Kerusakan lahan pasca-tambang: Biaya reklamasi lahan agar dapat digunakan kembali untuk pertanian atau konservasi.

Sumber:

- US security think tank warns of China's grip over Indonesian nickel industry. Mongabay. February 2025. <https://news.mongabay.com/2025/02/us-security-think-tank-warns-of-chinas-grip-over-indonesian-nickel-industry/>
- Indonesia rushes mining law amendments, raising environmental and governance alarms. Mongabay. January 2025. <https://news.mongabay.com/2025/01/indonesia-rushes-mining-law-amendments-raising-environmental-and-governance-alarms/>
- Photos: The lives and forests bound to Indonesia's nickel dreams. Mongabay. December 2024. <https://news.mongabay.com/2024/12/photos-the-lives-and-forests-bound-to-indonesias-nickel-dreams/>
- Indonesia Miner: Export ban since June 2023, bauxite smelter is still stalled. Indonesia Miner. January 2024. <https://indonesiaminer.com/news/detail/2024-01-31164618-export-ban-since-june-2023-bauxite-smelter-is-still-stalled>
- Indonesian nickel project harms environment and human rights, report saysM o n g a b a y . February 2024.